

ANALISIS PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DI KANTOR
KECAMATAN KOTA RAJABerta Tlonaen¹, Stefanus Reinati², Jhon S. Liem³tlonaemberta@gmail.com¹, reinatistef@gmail.com², liemjhon46@gmail.com³Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Persatuan Guru 1945
NTT

ABSTRAK

Pengelolaan administrasi keuangan merupakan aspek penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Administrasi keuangan yang dikelola secara baik akan mendukung perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, dan pelaporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan administrasi keuangan di Kantor Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap informan yang terlibat langsung dalam pengelolaan administrasi keuangan. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan administrasi keuangan di Kantor Kecamatan Kota Raja secara umum telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, meliputi perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pencatatan, serta pelaporan keuangan. Namun demikian, masih ditemukan beberapa kendala, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, belum optimalnya pemahaman aparatur terhadap sistem administrasi keuangan, serta keterbatasan sarana dan prasarana pendukung. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kompetensi aparatur melalui pendidikan dan pelatihan, serta penguatan sistem administrasi keuangan dan penyediaan sarana pendukung yang memadai guna meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di tingkat kecamatan.

Kata Kunci: Administrasi Keuangan, Pengelolaan Keuangan, Kecamatan Kota Raja, Akuntabilitas, Pemerintahan Daerah.

ABSTRACT

Financial administration management is an essential component in achieving effective, transparent, and accountable public governance. Proper financial administration supports budget planning, implementation, recording, and financial reporting in accordance with applicable regulations. This study aimed to analyze the financial administration management at the Kota Raja District Office, Kupang City. A descriptive qualitative approach was employed in this research. Data were collected through observations, interviews, and documentation involving key informants directly responsible for financial administration activities. The data were analyzed using qualitative data analysis techniques consisting of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings indicate that financial administration management at the Kota Raja District Office has generally been implemented in accordance with established procedures and government regulations, covering budget planning, budget implementation, financial recording, and financial reporting. However, several challenges remain, including limited human resources, insufficient understanding of the financial administration system among staff, and inadequate supporting facilities and infrastructure. Therefore, improving the competency of government personnel through education and training, strengthening the financial administration system, and providing adequate supporting facilities are necessary to enhance the effectiveness, efficiency, transparency, and accountability of financial management at the district level.

Keywords: Financial Administration, Financial Management, Kota Raja District Office, Accountability, Local Government.

PENDAHULUAN

Pengelolaan administrasi keuangan merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Pengelolaan keuangan yang dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel menjadi prasyarat bagi setiap organisasi sektor publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dalam konteks pemerintahan daerah, administrasi keuangan tidak hanya berfungsi sebagai proses pencatatan dan pelaporan, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian, pengambilan keputusan, serta bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat. Menurut Mardiasmo (2021), pengelolaan keuangan sektor publik harus berorientasi pada prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan agar mampu mendukung terciptanya pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Penerapan otonomi daerah melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya, termasuk pengelolaan keuangan daerah. Kewenangan tersebut menuntut setiap perangkat daerah untuk mampu melaksanakan administrasi keuangan secara profesional mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban anggaran. Selain itu, pengelolaan keuangan daerah juga harus mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menegaskan bahwa setiap pengelolaan keuangan harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.

Administrasi keuangan yang baik akan menghasilkan informasi keuangan yang akurat sehingga dapat menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan. Mahmudi (2019) menyatakan bahwa administrasi keuangan daerah merupakan bagian integral dari sistem pengendalian manajemen sektor publik yang bertujuan menjamin penggunaan anggaran secara efektif dan akuntabel. Oleh karena itu, keberhasilan pengelolaan administrasi keuangan sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia, sistem administrasi yang diterapkan, serta komitmen aparatur dalam menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kecamatan sebagai salah satu perangkat daerah memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam melaksanakan fungsi tersebut, kecamatan mengelola anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membiayai berbagai program dan kegiatan. Pengelolaan administrasi keuangan pada tingkat kecamatan harus dilaksanakan secara tertib melalui tahapan perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban keuangan. Ketepatan dalam setiap tahapan tersebut akan menentukan efektivitas pelaksanaan program pembangunan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Kantor Kecamatan Kota Raja merupakan salah satu perangkat daerah di Kota Kupang yang bertanggung jawab dalam mengelola administrasi keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, kecamatan mengelola berbagai jenis belanja, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal untuk mendukung pelaksanaan program pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Selain itu, kecamatan juga berperan dalam mendukung pemberdayaan masyarakat melalui berbagai program pembangunan yang dibiayai oleh pemerintah daerah.

Meskipun sistem pengelolaan administrasi keuangan telah diatur secara jelas, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Berdasarkan hasil observasi awal, masih ditemukan beberapa permasalahan, antara lain keterbatasan sumber daya manusia

yang memiliki kompetensi di bidang administrasi keuangan, belum optimalnya pemahaman aparaturnya terhadap sistem pengelolaan keuangan daerah, serta keterbatasan sarana dan prasarana pendukung administrasi. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi ketepatan penyusunan laporan keuangan, efektivitas pelaksanaan anggaran, serta kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan pada tingkat kecamatan.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kualitas pengelolaan administrasi keuangan sangat dipengaruhi oleh kompetensi aparaturnya dan sistem administrasi yang diterapkan. Hege, Jagi, Atto, Susilawati, dan Selan (2023) dalam penelitiannya mengenai analisis rasio keuangan menegaskan bahwa pengelolaan keuangan yang dilakukan secara baik akan meningkatkan efektivitas pengelolaan organisasi dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat. Selanjutnya, Selan (2022) menjelaskan bahwa tata kelola organisasi yang didukung oleh sistem administrasi yang baik akan meningkatkan kinerja organisasi dan kualitas pelayanan publik. Penelitian Holbala, Selan, dan Atto (2024) juga menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap regulasi dan administrasi yang baik menjadi faktor penting dalam meningkatkan akuntabilitas organisasi sektor publik.

Berdasarkan berbagai penelitian tersebut masih terdapat kesenjangan penelitian (research gap), karena sebagian besar penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pada analisis kinerja keuangan, kepatuhan administrasi, maupun efektivitas organisasi secara umum, sedangkan kajian yang secara khusus menganalisis proses pengelolaan administrasi keuangan pada tingkat kecamatan masih relatif terbatas, khususnya di Kota Kupang. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki urgensi untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan administrasi keuangan pada Kantor Kecamatan Kota Raja serta mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam proses pengelolaannya.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan administrasi keuangan di Kantor Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan, sekaligus menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan sektor publik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan di Kantor Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis kondisi nyata pengelolaan administrasi keuangan berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan.

Penelitian dilaksanakan di Kantor Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, pada tahun 2026. Lokasi penelitian dipilih secara sengaja karena kecamatan merupakan salah satu perangkat daerah yang memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan informan yang terlibat dalam pengelolaan administrasi keuangan, seperti pimpinan dan pegawai yang menangani administrasi keuangan di Kantor Kecamatan Kota Raja. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen pendukung, antara lain dokumen administrasi keuangan, laporan keuangan, arsip, peraturan perundang-undangan, serta literatur yang relevan dengan pengelolaan administrasi keuangan sektor publik.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan administrasi keuangan secara langsung di lingkungan Kantor Kecamatan Kota Raja. Wawancara dilakukan secara mendalam kepada informan yang memahami proses pengelolaan administrasi keuangan guna memperoleh informasi mengenai perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, pelaporan, serta kendala yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan administrasi keuangan sebagai data pendukung penelitian.

Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari beberapa informan, sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi sehingga data yang diperoleh memiliki tingkat kredibilitas yang lebih baik.

Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) yang meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi dan memfokuskan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk uraian naratif sehingga memudahkan peneliti dalam memahami hubungan antarfenomena. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis yang telah diverifikasi secara terus-menerus selama proses penelitian untuk menghasilkan temuan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan administrasi keuangan di Kantor Kecamatan Kota Raja telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengikuti siklus pengelolaan keuangan daerah yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban keuangan. Seluruh proses tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta didukung oleh penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD-RI) sebagai media pencatatan dan pelaporan keuangan.

Pada tahap perencanaan, penyusunan anggaran diawali dengan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) berdasarkan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan. Dokumen tersebut kemudian ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebagai dasar pelaksanaan seluruh kegiatan. Hasil ini menunjukkan bahwa proses perencanaan telah dilakukan secara sistematis sesuai prinsip pengelolaan keuangan daerah. Menurut Nordiawan dan Hertianti (2019), perencanaan anggaran merupakan tahap yang sangat penting karena menjadi dasar pelaksanaan program sekaligus alat pengendalian penggunaan anggaran. Pendapat tersebut diperkuat oleh Halim (2014) yang menyatakan bahwa penyusunan anggaran pemerintah harus dilakukan secara partisipatif agar program yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Tahap pelaksanaan administrasi keuangan dilaksanakan melalui mekanisme penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), hingga Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Seluruh transaksi dicatat oleh bendahara pengeluaran ke dalam Buku Kas Umum (BKU) beserta buku pembantu lainnya sehingga setiap penggunaan anggaran memiliki bukti administrasi yang lengkap. Prosedur tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran telah mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku. Menurut Mahmudi (2016), pelaksanaan anggaran merupakan proses realisasi anggaran yang harus didukung oleh dokumen yang sah

agar dapat dipertanggungjawabkan secara administratif. Sementara itu, Mulyadi (2016) menjelaskan bahwa pencatatan transaksi secara sistematis merupakan bagian penting dalam sistem administrasi keuangan untuk mendukung efektivitas pengendalian internal organisasi.

Pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban, Kantor Kecamatan Kota Raja secara rutin menyusun Surat Pertanggungjawaban (SPJ), Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Seluruh laporan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan diproses melalui aplikasi SIPD-RI sehingga penyajian laporan menjadi lebih cepat, akurat, dan terdokumentasi secara elektronik. Menurut Mahmudi (2016), pelaporan keuangan merupakan bentuk akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat atas penggunaan anggaran yang dikelola. Senada dengan itu, Halim (2014) menegaskan bahwa laporan keuangan pemerintah harus disusun secara transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD-RI) memberikan kontribusi yang signifikan terhadap tertib administrasi keuangan. Melalui sistem tersebut, seluruh proses mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan hingga pelaporan dilakukan secara terintegrasi sehingga meminimalkan kesalahan pencatatan, mempercepat proses pelaporan, serta meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan. Penerapan sistem digital ini sejalan dengan tuntutan reformasi birokrasi yang mengedepankan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik (e-government).

Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan beberapa kendala dalam pengelolaan administrasi keuangan. Kendala tersebut meliputi keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang administrasi keuangan, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung seperti komputer dan jaringan internet, serta perlunya peningkatan kemampuan pegawai dalam memahami perkembangan regulasi dan aplikasi SIPD-RI. Selain itu, masih ditemukan keterlambatan dalam penyusunan laporan keuangan akibat tingginya beban kerja pegawai pada waktu tertentu.

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Hege (2022) yang menyatakan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam meningkatkan efektivitas kinerja organisasi pemerintahan. Penelitian Liem et al. (2025) juga menunjukkan bahwa keberhasilan organisasi publik sangat dipengaruhi oleh kualitas kepemimpinan, kompetensi aparatur, dan sistem pengelolaan administrasi yang baik. Selain itu, hasil penelitian Boimata et al. (2023) menegaskan bahwa pengelolaan administrasi dan keuangan yang dilakukan secara efektif akan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan serta akuntabilitas organisasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis pengelolaan administrasi keuangan di Kantor Kecamatan Kota Raja Kota Kupang, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan administrasi keuangan di Kantor Kecamatan Kota Raja pada umumnya telah berjalan dengan baik dan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan serta Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku. Proses pengelolaan administrasi keuangan telah mencakup tahapan perencanaan anggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam pelaksanaannya, pengelolaan administrasi keuangan didukung oleh penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD-RI) yang membantu proses

pencatatan, penatausahaan, serta pelaporan keuangan secara lebih tertib, transparan, dan akuntabel. Penerapan sistem tersebut memberikan kemudahan dalam pengendalian administrasi keuangan serta meningkatkan efisiensi penyusunan laporan keuangan.

Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan beberapa kendala yang masih dihadapi, antara lain keterbatasan sumber daya manusia yang memahami pengelolaan administrasi keuangan berbasis teknologi, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, serta perlunya peningkatan kompetensi pegawai melalui pelatihan dan bimbingan teknis. Oleh karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan fasilitas pendukung, dan evaluasi pelaksanaan SOP secara berkala menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan administrasi keuangan di Kantor Kecamatan Kota Raja.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut.

1. Bagi Kantor Kecamatan Kota Raja, diharapkan terus meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi keuangan melalui peningkatan kompetensi aparatur, khususnya dalam penguasaan aplikasi SIPD-RI, pemahaman terhadap regulasi terbaru, serta peningkatan kedisiplinan dalam penyusunan dan penyampaian laporan keuangan agar semakin efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
2. Pemerintah Kota Kupang diharapkan dapat memberikan dukungan berupa peningkatan sarana dan prasarana pendukung administrasi keuangan, seperti penyediaan perangkat komputer, jaringan internet yang memadai, serta pelaksanaan pelatihan dan bimbingan teknis secara berkelanjutan bagi aparatur pengelola keuangan di tingkat kecamatan.
3. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan penelitian mengenai pengelolaan administrasi keuangan dengan melibatkan lebih banyak objek penelitian pada beberapa kecamatan atau instansi pemerintah lainnya, sehingga dapat diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai penerapan administrasi keuangan daerah serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pengelolaannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, I. (2019). Akuntansi sektor publik: Suatu pengantar (Edisi ke-4). Erlangga.
- Halim, A. (2014). Akuntansi keuangan daerah. Salemba Empat.
- Hege, M. A. (2022). Pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja pegawai pada Kantor Lurah Ona' Tali, Kecamatan Rote Tengah, Kabupaten Rote Ndao. *Jurnal Administrasi Terapan*, 2(2), 354–366.
- Hege, M. A. (2023). Pengaruh budaya organisasi dan kompetensi terhadap motivasi pegawai Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT. *Jurnal Administrasi Terapan*, 3(1), 46–54.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2019). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta: Kemendagri.
- Mahmudi. (2016). Analisis laporan keuangan pemerintah daerah (Edisi ke-3). UPP STIM YKPN.
- Mahmudi. (2019). Manajemen keuangan daerah. UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2021). Akuntansi sektor publik (Edisi terbaru). Andi.
- Moleong, L. J. (2021). Metodologi penelitian kualitatif (Edisi revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi. (2016). Sistem akuntansi (Edisi ke-4). Salemba Empat.
- Nordiawan, D., & Hertianti, A. (2019). Akuntansi sektor publik (Edisi ke-3). Salemba Empat.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta.
- Sugiyono. (2023). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta.